



DOKUMEN PANDUAN OPERASIONAL DJP

Panduan Komprehensif: Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Membedah Cetak Biru SOP Pengawasan
Berdasarkan SE-8/PJ/2026

Paradigma Baru Pengawasan Kepatuhan



Tiga Pilar Ruang Lingkup Pengawasan



Pengawasan WP Terdaftar

- Meliputi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) & Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).
- Instrumen: Analisis data, P2DK, Imbauan, Teguran.



Pengawasan WP Belum Terdaftar

- Fokus pada Ekstensifikasi Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif/objektif.
- Instrumen: P2DK Ekstensifikasi, penerbitan NPWP jabatan.



Pengawasan Wilayah

- Pemetaan potensi ekonomi dan perluasan basis data via KPD (Kegiatan Pengumpulan Data).
- Metode: Canvassing, visitasi, data nonlapangan.

Arsitektur Perencanaan & Komite Kepatuhan

Kantor Pusat DJP

Menetapkan Kebijakan Nasional & CRM (Compliance Risk Management)



Kantor Wilayah (Kanwil) DJP

Menetapkan strategi pengamanan penerimaan tingkat regional.
Penetapan WP Strategis.



Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Eksekusi operasional. Menyusun dan mengusulkan 3 Daftar Prioritas:

DPP: Daftar Prioritas
Pengawasan (Target PKM)

DPE: Daftar Prioritas
Ekstensifikasi

DPKPD: Daftar Prioritas
Kegiatan Pengumpulan Data

Segmentasi Wajib Pajak Terdaftar

	Wajib Pajak Strategis	Wajib Pajak Lainnya
Definisi & Kriteria	WP Besar, Khusus, Madya, dan WP Pratama penentu penerimaan terbesar.	Seluruh WP selain WP Strategis di KPP Pratama.
Penetapan	Diusulkan KPP, Ditetapkan oleh Kepala Kanwil (berlaku 1 tahun).	Berdasarkan Peta Zona Pengawasan di KPP.
Pengawasan (Assignment)	Ditugaskan khusus kepada Seksi Pengawasan WP Strategis KPP.	Ditugaskan kepada Account Representative berdasarkan penguasaan kewilayahan.

Penguasaan Kewilayahan: Mekanisme Assignment

Analisis Monografi Fiskal

Wilayah dibagi berdasarkan jumlah penduduk, WP aktif, sebaran PKP, dan gambaran ekonomi daerah.

Peta Zona Pengawasan

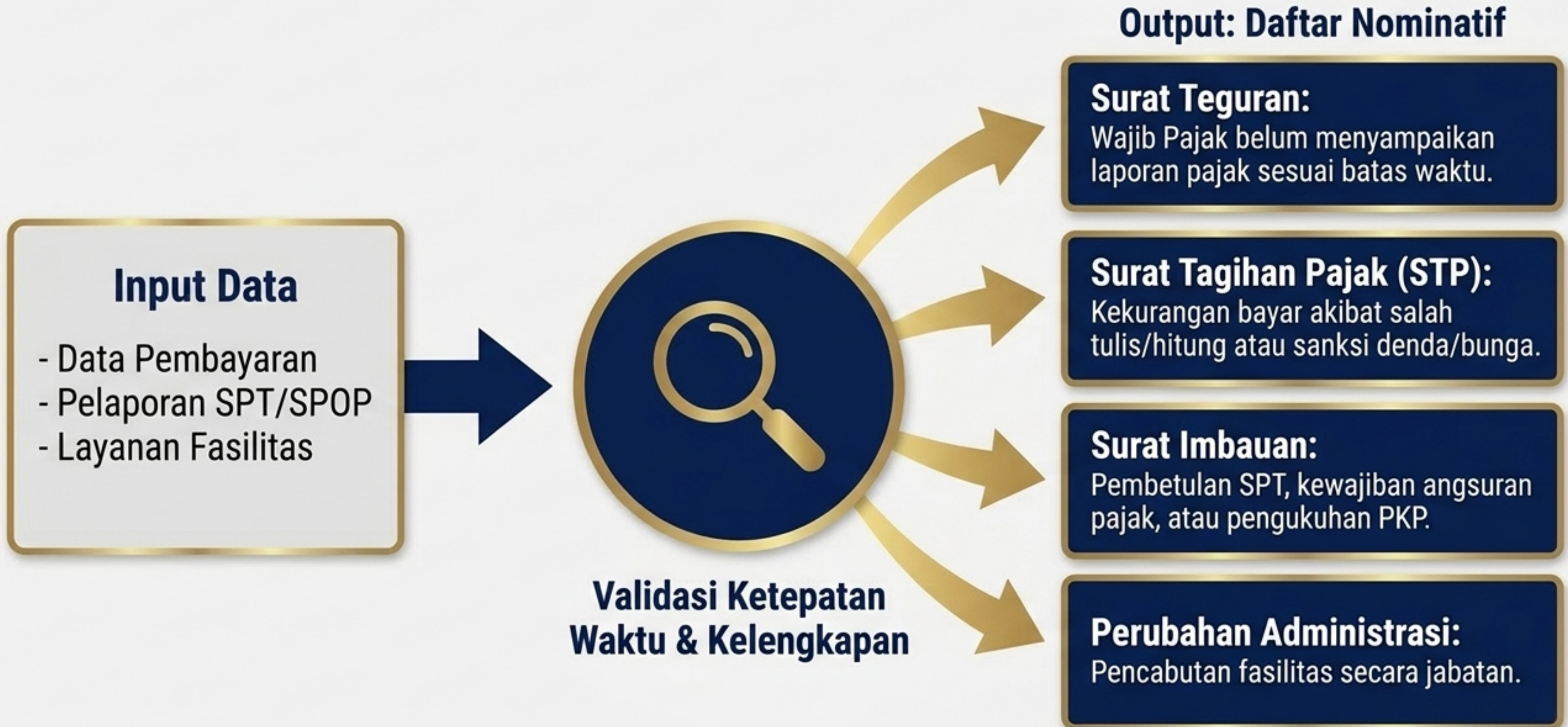
Batas wilayah mengikuti administrasi pemerintahan (kecamatan/kelurahan) atau batas alam/permanen (sungai/jalan raya).

Peta Zona Petugas

Pembagian habis Peta Zona Pengawasan kepada masing-masing AR untuk pemerataan beban kerja.



Filter Pertama: Penelitian Kepatuhan Formal



Inti Pengawasan: Ekosistem Penelitian Material

Sumber Data: Data internal, data pihak ketiga (ILAP), data intelijen.

Business Intelligence & CRM Profile

Analisis Laporan Keuangan &
Transfer Pricing

Penilaian Pajak & Mirroring
Pemeriksaan

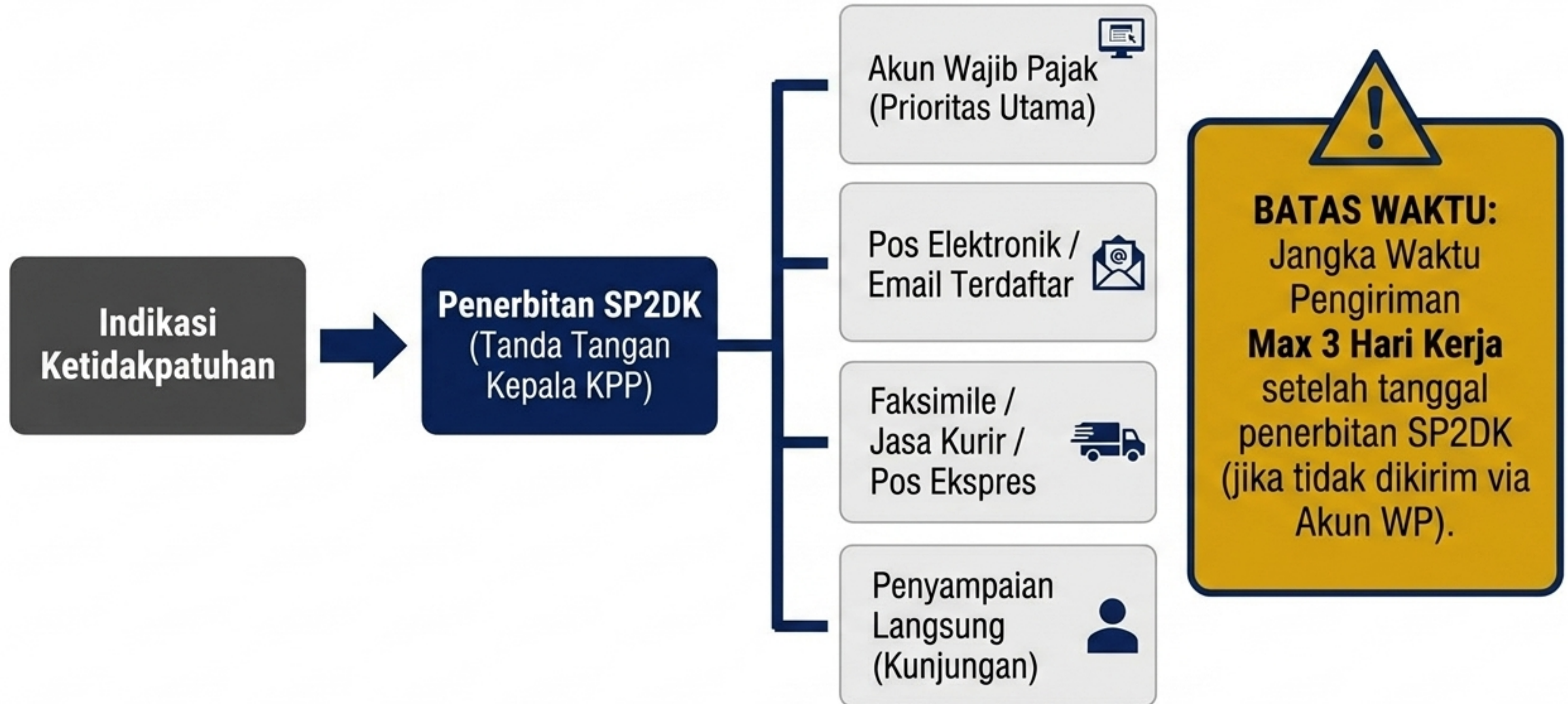
Kunjungan/Observasi
Lapangan

OUTPUT: Kertas Kerja (KKA/KKPt) yang memuat Estimasi
Potensi Kewajiban Perpajakan yang Belum Dipenuhi.

Matriks Skala Penelitian Material (KPP)

Komprehensif (Intensif)		Sederhana (Fokus)		Otomatis (Cepat)	
• Durasi: 22 hari kerja (Bisa diperpanjang max 44 hari untuk Transfer Pricing). • Cakupan: Seluruh jenis pajak (All Taxes) secara menyeluruh. • Target Utama: WP Strategis, Reorganisasi Bisnis, Transaksi Afiliasi.		• Durasi: 10 hari kerja. • Cakupan: Sebagian atau seluruh jenis pajak tanpa analisis ekstensif. • Target Utama: WP Lainnya, pengujian kebenaran hitung & ekualisasi.		• Durasi: 1 hari kerja. • Cakupan: Pajak terbatas berdasarkan Data Konkret. • Target Utama: Sistem penerbitan berdasarkan penemuan data faktual langsung.	

Eksekusi P2DK: Penerbitan dan Pengiriman SP2DK



Linimasa & Opsi Tanggapan Wajib Pajak



CRITICAL PROTOCOL

Dalam pelaksanaan Video Conference, KPP berhak merekam.
Wajib Pajak Dilarang Keras melakukan perekaman/penyebaran video/audio.
Pelanggaran membatalkan sesi dan berpotensi sanksi hukum!

Resolusi & Tindak Lanjut Akhir (LHP2DK)

Input: Jika WP tidak merespons sama sekali -> Lakukan Kunjungan -> Buat BAP2DK Sepihak

BAP2DK / LHP2DK

Selesai (Clear)

Tidak ada indikasi tersisa, WP setuju dan membetulkan SPT / Membayar.

Eskalasi ke Pemeriksaan

Ditemukan potensi besar, WP menolak temuan, atau data belum akurat.

Eskalasi Penegakan Hukum

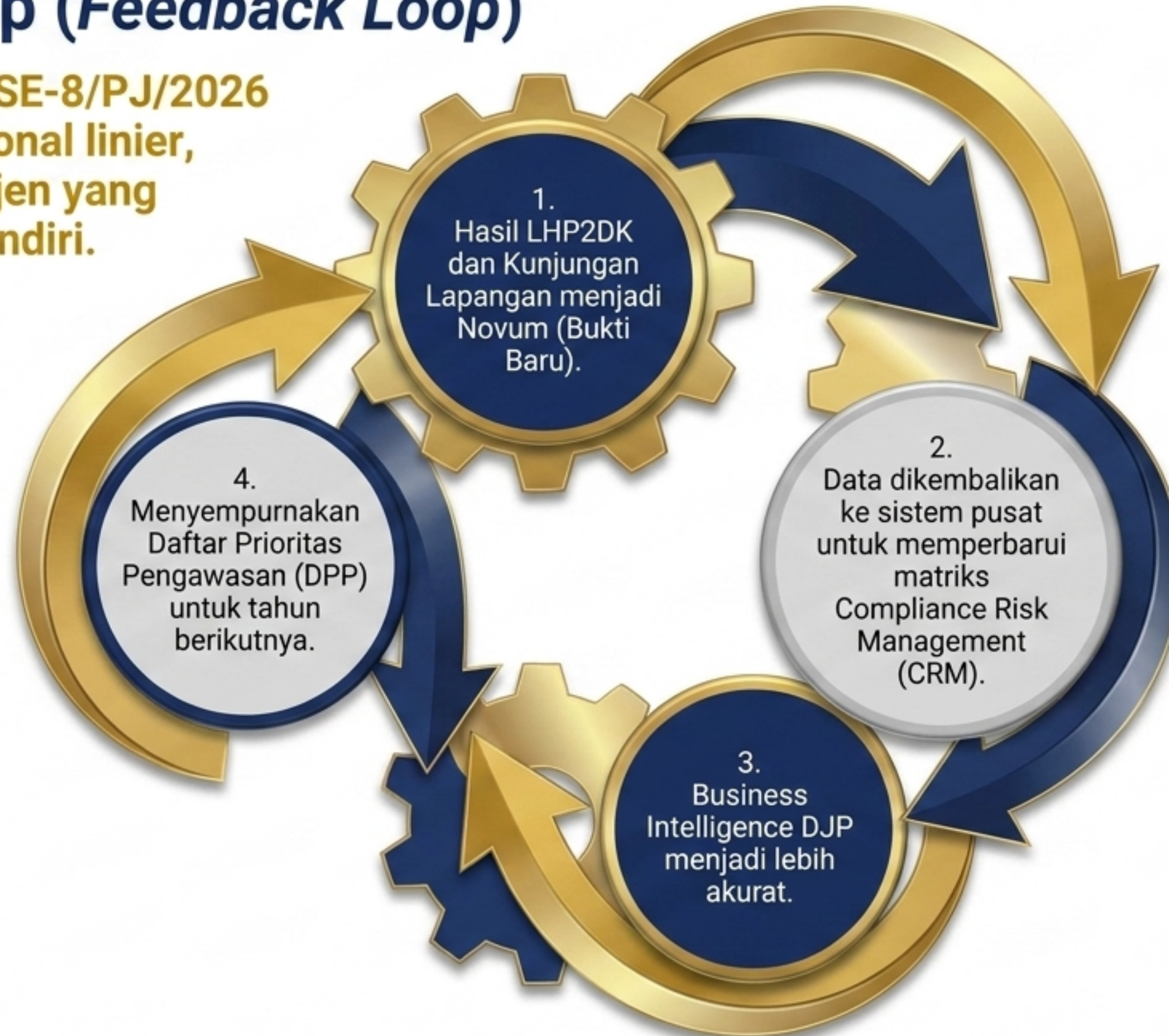
Diteruskan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan / Penyidikan jika terindikasi Tindak Pidana Perpajakan.

Tindakan Jabatan

Perubahan data, pencabutan fasilitas, atau *geotagging* wilayah.

Interkoneksi Modul Pengawasan: Sistem Tertutup (*Feedback Loop*)

Pengawasan di bawah SE-8/PJ/2026
bukan sekadar operasional linier,
melainkan sirkuit intelijen yang
memperkuat dirinya sendiri.



Poin Kunci Pengawasan Kepatuhan



Perencanaan Berbasis Risiko

Pengawasan tidak lagi acak. Assignment Wajib Pajak berbasis CRM, hierarki kanwil, dan segmentasi zonasi kewilayahan yang tegas.



Durasi Valid & Mengikat

Waktu pelaksanaan penelitian (1-22 hari) dan waktu tanggapan Wajib Pajak (14 hari) berjalan absolut dalam sistem untuk kepastian hukum.



Interkoneksi Sistem Inti

Setiap respon (atau nihilnya respon) dari Wajib Pajak terekam menjadi profil kepatuhan permanen (*feedback loop*) untuk proses pemeriksaan dan intelijen.

Baca Dokumen Lengkap SE-8/PJ/2026 pada Jaringan Dokumentasi Internal DJP.